KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5013-7195-5815-4506

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692011/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(08)	SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(692011)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Sebesar	:	Rp. 18.638.041.000	(DELAPAN BELAS MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	18.638.041.000
135.01.WA.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp.	18.638.041.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	18.638.041.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 18.638.041.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5013-7195-5815-4506

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen				18.638.041.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum				18.638.041.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	16.143.868.000
Rincian Output	:	01	EBA.001	Pengelolaan BMN Kantor Wilayah	2.00	Laporan	166.250.000
		02	EBA.002	Layanan Kerja Sama	1.00	Laporan	35.170.000
		03	EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	10.000.000
		04	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	364.699.000
		05	EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	163.800.000
		06	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	56.850.000
		07	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	15.347.099.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		126,00	Unit, m2, Paket	1.281.950.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	126.00	Unit	1.281.950.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		97,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	346.368.000
Rincian Output	:	01	EBC.001	Layanan Manajemen SDM Internal	1.00	Layanan	77.568.000
		02	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	96.00	Orang	268.800.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		15,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	865.855.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	2.00	Laporan	386.225.000
		02	EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Kantor WIlayah	3.00	Dokumen	87.720.000
		03	EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	2.00	Laporan	206.530.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5013-7195-5815-4506

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

		Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
04	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Laporan		49.500.000
05	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen		19.000.000
06	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Laporan		87.740.000
07	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Laporan		29.140.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025

DS:5013-7195-5815-4506

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	18.638.041.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	18.638.041.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025

DS:5013-7195-5815-4506

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692011	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**	**11.555.152**	**5.827.939**	**1.254.950**	**-**	**-**	**18.638.041**		
135.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**11.555.152**	**5.827.939**	**1.254.950**	**-**	**-**	**18.638.041**		
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**	**11.555.152**	**5.827.939**	**1.254.950**	**-**	**-**	**18.638.041**		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.555.152	4.588.716	-	-	-	16.143.868	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	11.555.152	4.588.716	-	-	-	16.143.868	010@	
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	27.000	1.254.950	-	-	1.281.950	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	27.000	1.254.950	-	-	1.281.950	010	
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	346.368	-	-	-	346.368	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	346.368	-	-	-	346.368	010@	
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	865.855	-	-	-	865.855	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025

DS:5013-7195-5815-4506

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	865.855	-	-	-	865.855	010@	
	JUMLAH	**11.555.152**	**5.827.939**	**1.254.950**	**-**	**-**	**18.638.041**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5013-7195-5815-4506

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692011) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**692011**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.446.575	1.445.266	2.729.040	1.445.259	1.447.090	1.448.279	1.445.585	1.447.090	1.447.090	1.445.266	1.445.259	1.446.242	18.638.041
		BELANJA PEGAWAI	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	963.043	11.555.152
		BELANJA BARANG	483.656	482.347	511.171	482.340	484.171	485.360	482.666	484.171	484.171	482.347	482.340	483.199	5.827.939
		BELANJA MODAL	0	0	1.254.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.950
	135.01.WA.7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.446.575	1.445.266	2.729.040	1.445.259	1.447.090	1.448.279	1.445.585	1.447.090	1.447.090	1.445.266	1.445.259	1.446.242	18.638.041
		51 BELANJA PEGAWAI	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	962.919	963.043	11.555.152
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	483.656	482.347	511.171	482.340	484.171	485.360	482.666	484.171	484.171	482.347	482.340	483.199	5.827.939
		53 BELANJA MODAL	0	0	1.254.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.254.950

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
IV A. B L O K I R

DS:5013-7195-5815-4506

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692011] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN		
692011	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**				524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	776.227		Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	16.200
	52 Belanja Barang	Rp.	776.227		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
135.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**				Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7099	**Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum**				524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
7099.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	38.440
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)				Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	377.673		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	14.925				
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
7099.EBC	**Layanan Manajemen SDM Internal**						
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	94.383				
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.250				
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
7099.EBD	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**						
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	232.356				
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692011/2025
IV B. C A T A T A N

DS:5013-7195-5815-4506

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692011] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7714-1450-0207-2410

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692051/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
3. Provinsi	:	(08)	SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(692051)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Sebesar	:	Rp. 3.482.602.000	(TIGA MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA ENAM RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	3.482.602.000
135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	3.482.602.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	3.482.602.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A D A N G	(010)	Rp.	3.482.602.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7714-1450-0207-2410

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				3.482.602.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				3.482.602.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan				
		2. 01	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah				
		3. 01	Persentase Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		5,00	layanan	2.501.045.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		4.00	layanan	2.406.805.000
		02 BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		1.00	layanan	94.240.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga		1,00	Perkara	1.890.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah		1.00	Perkara	1.890.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		7,00	Lembaga	979.667.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah		7.00	Lembaga	979.667.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025

DS:7714-1450-0207-2410

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp. 3.482.602.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp. 0	(2) RPLN	US$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp. 3.482.602.000	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	(2) RHLN	US$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp. 0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025

DS:7714-1450-0207-2410

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692051	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**	**-**	**3.482.602**	**-**	**-**	**-**	**3.482.602**		
135.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**3.482.602**	**-**	**-**	**-**	**3.482.602**		
7110	**Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah**	**-**	**3.482.602**	**-**	**-**	**-**	**3.482.602**		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	2.501.045	-	-	-	2.501.045	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
04	PNBP	-	2.501.045	-	-	-	2.501.045	010@	
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	-	1.890	-	-	-	1.890	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
04	PNBP	-	1.890	-	-	-	1.890	010	
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	979.667	-	-	-	979.667	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
04	PNBP	-	979.667	-	-	-	979.667	010@	
	JUMLAH	**-**	**3.482.602**	**-**	**-**	**-**	**3.482.602**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:7714-1450-0207-2410

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692051) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**692051**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	426.922	447.994	212.075	360.303	474.305	251.130	453.232	107.079	109.775	504.151	135.637	3.482.602
		BELANJA BARANG	0	426.922	447.994	212.075	360.303	474.305	251.130	453.232	107.079	109.775	504.151	135.637	3.482.602
	135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	426.922	447.994	212.075	360.303	474.305	251.130	453.232	107.079	109.775	504.151	135.637	3.482.602
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	426.922	447.994	212.075	360.303	474.305	251.130	453.232	107.079	109.775	504.151	135.637	3.482.602

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025
IV A. B L O K I R

DS:7714-1450-0207-2410

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692051] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN		
692051	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	29.025
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	1.249.838		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	52 Belanja Barang	Rp.	1.249.838		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
135.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**				524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
7110	**Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah**				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	59.162
7110.BAH	**Pelayanan Publik Lainnya**				Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)				Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	570.056				
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	9.900				
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	254.208				
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	127.272				
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
7110.BIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**						
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)						
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	200.215				
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024						
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)						

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692051/2025
IV B. C A T A T A N

DS:7714-1450-0207-2410

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692051] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2700-3042-9938-0490

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693133/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(12)	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
3. Provinsi	:	(08)	SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(693133)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Sebesar	:	Rp. 321.693.000	(TIGA RATUS DUA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	321.693.000
135.12.WA.	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp.	321.693.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	321.693.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 321.693.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2700-3042-9938-0490

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen				321.693.000
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah				321.693.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		4,00	Rekomendasi Kebijakan	312.056.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		4.00	Rekomendasi Kebijakan	312.056.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		30,00	orang	9.637.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum		30.00	orang	9.637.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025

DS:2700-3042-9938-0490

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp. 321.693.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp. 321.693.000	(2) RPLN	US$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp. 0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	(2) RHLN	US$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp. 0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025

DS:2700-3042-9938-0490

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693133	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**	**-**	**321.693**	**-**	**-**	**-**	**321.693**		
135.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**-**	**321.693**	**-**	**-**	**-**	**321.693**		
7143	**Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**	**-**	**321.693**	**-**	**-**	**-**	**321.693**		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	312.056	-	-	-	312.056	08 . 55	
01	RM	-	312.056	-	-	-	312.056	010@	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	9.637	-	-	-	9.637	08 . 55	
01	RM	-	9.637	-	-	-	9.637	010	
	JUMLAH	**-**	**321.693**	**-**	**-**	**-**	**321.693**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:2700-3042-9938-0490

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693133) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693133**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	54.992	52.150	34.440	42.600	18.800	45.267	27.650	29.635	16.159	0	0	321.693
		BELANJA BARANG	0	54.992	52.150	34.440	42.600	18.800	45.267	27.650	29.635	16.159	0	0	321.693
	135.12.WA.7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	54.992	52.150	34.440	42.600	18.800	45.267	27.650	29.635	16.159	0	0	321.693
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	54.992	52.150	34.440	42.600	18.800	45.267	27.650	29.635	16.159	0	0	321.693

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025
IV A. B L O K I R

DS:2700-3042-9938-0490

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693133] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
693133	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	131.583		
	52 Belanja Barang	Rp.	131.583		
135.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
7143	**Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah**				
7143.ABD	**Kebijakan Bidang Hukum dan HAM**				
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	120.833		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.750		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693133/2025
IV B. C A T A T A N

DS:2700-3042-9938-0490

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693133] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:2605-7594-2626-8082

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693099/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(11)	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3. Provinsi	:	(08)	SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(693099)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Sebesar	:	Rp. 1.664.556.000	(SATU MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.664.556.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 1.664.556.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025

DS:2605-7594-2626-8082

Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	139.438.000
BB.7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	139.438.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.525.118.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	1.525.118.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi				139.438.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah				139.438.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan				
		2. 02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		1,00	Rekomendasi Kebijakan	55.865.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah		1.00	Rekomendasi Kebijakan	55.865.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	83.573.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah		1.00	Lembaga	83.573.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				1.525.118.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				1.525.118.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah				
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi				
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah				
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		10,00	Lembaga	168.333.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah		10.00	Lembaga	168.333.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		7,00	Kelompok Masyarakat	100.298.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah		2.00	Kelompok Masyarakat	67.186.000
		02 BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum		5.00	Kelompok Masyarakat	33.112.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

				Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			Kelompok Masyarakat	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		1,00	Orang	5.925.000
Rincian Output		:	01 BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah		1.00	Orang	5.925.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		12,00	Lembaga	126.697.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah		12.00	Lembaga	126.697.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik		1,00	dokumen, Peta, Data	28.445.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah		1.00	dokumen	28.445.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	10.040.000
Rincian Output		:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum		1.00	Laporan	10.040.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		117,00	Orang	936.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	(PN)	117.00	Orang	936.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		14,00	Kelompok Masyarakat	149.380.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	(PN)	14.00	Kelompok Masyarakat	149.380.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025

DS:2605-7594-2626-8082

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

			Ket :			Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.664.556.000		a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.664.556.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025

DS:2605-7594-2626-8082

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693099	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**	**-**	**1.660.556**	**4.000**	**-**	**-**	**1.664.556**		
135.11.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**139.438**	**-**	**-**	**-**	**139.438**		
7133	**Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah**	**-**	**139.438**	**-**	**-**	**-**	**139.438**		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	55.865	-	-	-	55.865	08 . 55	
01	RM	-	55.865	-	-	-	55.865	010@	
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	83.573	-	-	-	83.573	08 . 55	
01	RM	-	83.573	-	-	-	83.573	010@	
135.11.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**1.521.118**	**4.000**	**-**	**-**	**1.525.118**		
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**	**-**	**1.521.118**	**4.000**	**-**	**-**	**1.525.118**		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	164.333	4.000	-	-	168.333	08 . 55	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025

DS:2605-7594-2626-8082

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	164.333	4.000	-	-	168.333	010@	
7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	-	100.298	-	-	-	100.298	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	100.298	-	-	-	100.298	010@	
7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	-	5.925	-	-	-	5.925	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	5.925	-	-	-	5.925	010	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	126.697	-	-	-	126.697	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	126.697	-	-	-	126.697	010@	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik	-	28.445	-	-	-	28.445	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	28.445	-	-	-	28.445	010@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025

DS:2605-7594-2626-8082

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	10.040	-	-	-	10.040	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	10.040	-	-	-	10.040	010@	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	936.000	-	-	-	936.000	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	936.000	-	-	-	936.000	010	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	-	149.380	-	-	-	149.380	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	149.380	-	-	-	149.380	010	
	JUMLAH	**-**	**1.660.556**	**4.000**	**-**	**-**	**1.664.556**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693099) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693099**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	133.764	133.764	134.148	136.787	137.787	139.887	133.764	133.764	133.764	133.764	133.764	179.600	1.664.556
		BELANJA BARANG	133.431	133.431	133.815	136.454	137.454	139.554	133.431	133.431	133.431	133.431	133.431	179.263	1.660.556
		BELANJA MODAL	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4.000
	135.11.BB.7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	7.772	7.772	7.772	9.172	10.172	12.272	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	45.646	139.438
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	7.772	7.772	7.772	9.172	10.172	12.272	7.772	7.772	7.772	7.772	7.772	45.646	139.438
	135.11.BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	125.992	125.992	126.376	127.615	127.615	127.615	125.992	125.992	125.992	125.992	125.992	133.954	1.525.118
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	125.659	125.659	126.043	127.282	127.282	127.282	125.659	125.659	125.659	125.659	125.659	133.617	1.521.118
		53 BELANJA MODAL	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
IV A. B L O K I R

DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693099] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
693099	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	193.818
	52 Belanja Barang	Rp.	193.818
135.11.BB	**Program Pembentukan Regulasi**		
7133	**Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah**		
7133.ABD	**Kebijakan Bidang Hukum dan HAM**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.752
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	750
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7133.BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	6.439
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	450
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	14.490
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
135.11.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		
7136	**Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah**		
7136.BDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	55.494
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.750
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	9.000
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.BDD	**Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	19.367
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	7.650
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.BIC	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	53.576
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
IV A. B L O K I R

DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693099] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.BMA	**Data dan Informasi Publik**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.700 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.500 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7136.FAE	**Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.900 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693099/2025
IV B. C A T A T A N

DS:2605-7594-2626-8082

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693099] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:9234-1214-2505-6453

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.692998/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
3. Provinsi	:	(08)	SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(692998)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Sebesar	:	Rp. 2.183.394.000	(DUA MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.183.394.000
135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp.	2.183.394.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.183.394.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A D A N G	(010)	Rp.	2.183.394.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:9234-1214-2505-6453

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				2.183.394.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah				2.183.394.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah				
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah				
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		1.650,00	Orang	2.112.239.000
Rincian Output	:	01 BDC.001	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah		1150.00	Orang	1.520.740.000
		02 BDC.002	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah		350.00	Orang	531.649.000
		03 BDC.003	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		150.00	Orang	59.850.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7121.BKB	Pemantauan produk		4,00	Produk, Layanan	71.155.000
Rincian Output	:	01 BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		4.00	Layanan	71.155.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025

DS:9234-1214-2505-6453

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.183.394.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	2.183.394.000		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025

DS:9234-1214-2505-6453

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692998	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**	**-**	**2.183.394**	**-**	**-**	**-**	**2.183.394**		
135.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**2.183.394**	**-**	**-**	**-**	**2.183.394**		
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**	**-**	**2.183.394**	**-**	**-**	**-**	**2.183.394**		
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	-	2.112.239	-	-	-	2.112.239	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
04	PNBP	-	2.112.239	-	-	-	2.112.239	010@	
7121.BKB	Pemantauan produk	-	71.155	-	-	-	71.155	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
04	PNBP	-	71.155	-	-	-	71.155	010@	
	JUMLAH	**-**	**2.183.394**	**-**	**-**	**-**	**2.183.394**		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:9234-1214-2505-6453

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (692998) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**692998**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	44.973	139.684	209.567	75.182	85.953	58.823	184.596	47.896	1.162.960	69.222	54.225	50.313	2.183.394
		BELANJA BARANG	44.973	139.684	209.567	75.182	85.953	58.823	184.596	47.896	1.162.960	69.222	54.225	50.313	2.183.394
	135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	44.973	139.684	209.567	75.182	85.953	58.823	184.596	47.896	1.162.960	69.222	54.225	50.313	2.183.394
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	44.973	139.684	209.567	75.182	85.953	58.823	184.596	47.896	1.162.960	69.222	54.225	50.313	2.183.394

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025
IV A. B L O K I R

DS:9234-1214-2505-6453

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692998] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
692998	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	956.890		
	52 Belanja Barang	Rp.	956.890		
135.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**				
7121	**Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah**				
7121.BDC	**Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**				
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	272.610		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	11.700		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	507.136		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	131.284		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
7121.BKB	**Pemantauan produk**				
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	34.160		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692998/2025
IV B. C A T A T A N

DS:9234-1214-2505-6453

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [692998] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:8525-8311-1363-8512

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693031/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Provinsi	:	(08)	SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(693031)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Sebesar	:	Rp. 700.000.000	(TUJUH RATUS JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	700.000.000
135.03.BB.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.	700.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	700.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 700.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8525-8311-1363-8512

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi				700.000.000
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah				700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan				
		2. 01	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		56,00	Rekomendasi Kebijakan	536.934.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah		56.00	Rekomendasi Kebijakan	536.934.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		30,00	Orang	150.898.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah		30.00	Orang	150.898.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	12.168.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah		1.00	Laporan	12.168.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.

Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025

DS:8525-8311-1363-8512

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	700.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	700.000.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025

DS:8525-8311-1363-8512

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693031	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**	**-**	**700.000**	**-**	**-**	**-**	**700.000**		
135.03.BB	**Program Pembentukan Regulasi**	**-**	**700.000**	**-**	**-**	**-**	**700.000**		
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**	**-**	**700.000**	**-**	**-**	**-**	**700.000**		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	-	536.934	-	-	-	536.934	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	536.934	-	-	-	536.934	010@	
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	-	150.898	-	-	-	150.898	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	150.898	-	-	-	150.898	010@	
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	12.168	-	-	-	12.168	08 . 55	
	(08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)								
01	RM	-	12.168	-	-	-	12.168	010@	
	JUMLAH	**-**	**700.000**	**-**	**-**	**-**	**700.000**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:8525-8311-1363-8512

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (693031) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**693031**	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	59.393	61.167	700.000
		BELANJA BARANG	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	59.393	61.167	700.000
	135.03.BB.7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	59.393	61.167	700.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	57.944	59.393	61.167	700.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025
IV A. B L O K I R

DS:8525-8311-1363-8512

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693031] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
693031	**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	125.439
	52 Belanja Barang	Rp.	125.439
135.03.BB	**Program Pembentukan Regulasi**		
7129	**Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**		
7129.ABD	**Kebijakan Bidang Hukum dan HAM**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	54.853
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.400
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	17.215
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.ADG	**Standarisasi Profesi dan SDM**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	17.902
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	900
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	29.190
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.FAE	**Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	2.979
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693031/2025
IV B. C A T A T A N

DS:8525-8311-1363-8512

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693031] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001